

BAB I

PENDAHULUAN

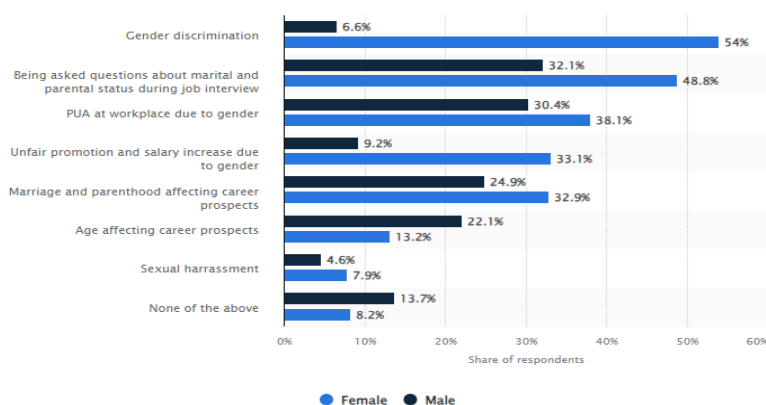
1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender dalam dunia kerja menjadi isu utama dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di Tiongkok dan Korea Selatan (Audina, 2022a). Salah satu aspek krusial dalam kesetaraan gender adalah kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan (A, 2018). Meskipun berbagai negara telah mengadopsi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan upah, ketimpangan ini masih menjadi tantangan yang signifikan (Humairah & Dewi, 2025).

Faktor utama yang menyebabkan kesenjangan upah gender berasal dari aspek institusional, sosial, dan budaya (Cortis et al., 2022). Dari sisi institusi, terdapat anggapan bahwa perempuan memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, serta bahwa beberapa jenis pekerjaan tidak sesuai bagi perempuan (Latura & Weeks, 2023). Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di berbagai negara, termasuk Tiongkok dan Korea Selatan, semakin memperkuat perbedaan ini. Dalam sistem patriarki, perempuan sering kali diharapkan untuk berperan dalam urusan domestik, yang membatasi peluang mereka dalam dunia profesional (Prasetyo, 2023). Adapun variabel kesenjangan gaji yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, jam kerja, serta gender atau jenis kelamin.

Di Tiongkok dan Korea Selatan, budaya patriarki menjadi salah satu akar utama kesenjangan upah gender (Jimin, 2024). Di Korea Selatan, fenomena *glass ceiling* menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Persepsi bahwa perempuan kurang kompeten dan kurang berdedikasi dibandingkan laki-laki membatasi peluang promosi dan meningkatkan kesenjangan gaji (Saragi & Agustina, 2022). Sementara itu, di Tiongkok, meskipun terdapat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pengaruh nilai Konfusianisme masih membentuk ekspektasi bahwa perempuan lebih cocok berperan dalam keluarga daripada berkarier (C. K. Lee, 2023). Selain itu, ruang gerak aktivisme feminis di negara tersebut lebih terbatas akibat kontrol pemerintah terhadap gerakan sosial, sehingga perjuangan untuk kesetaraan upah menghadapi tantangan yang lebih besar (Jiang & Zhou, 2022). Kesenjangan upah perempuan di kedua negara tetap bertahan, tidak hanya karena kebijakan yang belum sepenuhnya efektif, tetapi juga karena norma sosial yang menghambat perubahan struktural dalam dunia kerja (Hye-Sook Hwang, 2022).

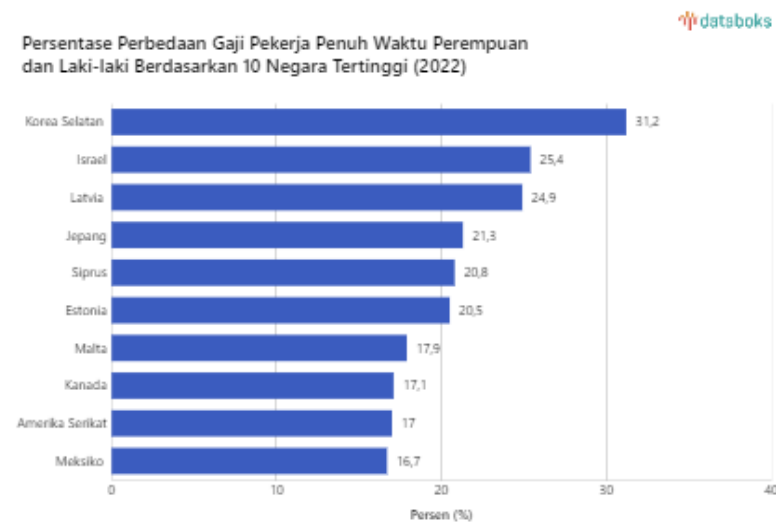
Gambar 1.1 Kasus Diskriminasi Gender Tiongkok di Tempat Kerja



(Sumber: Statista.com, 2024)

Berdasarkan data terbaru (Santika, 2004), perempuan di Tiongkok mengalami diskriminasi di tempat kerja dengan kesenjangan upah sebesar 22,5%, meskipun terjadi sedikit peningkatan sejak 2019 (Atara, 2021). Sementara itu, Korea Selatan tetap menjadi negara dengan kesenjangan gaji gender tertinggi di OECD, dengan perempuan hanya menerima 68,8% dari gaji laki-laki untuk pekerjaan yang sama (OECD, 2023).

Gambar 1.2 Daftar Negara dengan Kesenjangan Gaji Gender Terparah



(Sumber: Databoks, 2024)

Tiongkok dan Korea Selatan merupakan dua kekuatan ekonomi utama di Asia yang menghadapi tantangan signifikan dalam kesetaraan gender, terutama dalam aspek kesenjangan upah (Hartati et al., 2021). Meskipun kedua negara telah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan hak perempuan, kesenjangan gaji tetap menjadi permasalahan utama (Jimin, 2024). Di Korea Selatan, perempuan menerima rata-rata **31,2% lebih rendah** dibandingkan laki-laki, menjadikannya

negara dengan kesenjangan upah gender tertinggi di OECD (OECD, 2023). Sementara itu, di Tiongkok, perempuan memperoleh **81,6% dari gaji laki-laki**, dengan diskriminasi dalam rekrutmen dan promosi yang masih terjadi (Santika, 2004).

Gerakan feminisme di kedua negara memainkan peran krusial dalam memperjuangkan kesetaraan upah. Di Tiongkok, pengaruh Konfusianisme dan kontrol ketat pemerintah membatasi ruang gerak aktivisme feminis (Hye-Sook Hwang, 2022). Organisasi masyarakat sipil menghadapi pembatasan dalam menyuarakan tuntutan kesetaraan gender, sehingga perjuangan feminisme lebih banyak dilakukan melalui jalur akademik, advokasi hukum, dan aktivisme daring (Jiang & Zhou, 2022). Sebaliknya, Korea Selatan memiliki masyarakat sipil yang lebih terbuka, memungkinkan organisasi feminis untuk mengorganisir demonstrasi publik, melakukan lobi kebijakan, dan menggalang dukungan luas melalui media digital (Roces & Edwards, 2010).

Di Tiongkok, gerakan feminisme cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah dan lebih berfokus pada peningkatan kesadaran melalui media sosial, seni, dan literatur (Sun & Ding, 2024). Sebaliknya, di Korea Selatan, aktivisme feminis bersifat lebih langsung melalui aksi massa dan kampanye kebijakan, seperti gerakan #MeToo, yang berhasil mendorong amandemen Undang-Undang Larangan dan Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja pada 2018 (Prasetyo, 2023). Namun, meskipun berhasil mengubah

regulasi terkait pelecehan seksual, upaya untuk mengurangi diskriminasi gaji dan promosi kerja masih menghadapi kendala struktural.

Perjuangan kesetaraan upah di Tiongkok dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan yang mencolok, terutama dalam hal kebebasan gerakan feminis dalam menyuarakan tuntutan (T. Kim, 2009). Di Tiongkok, kontrol pemerintah terhadap wacana publik dan pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil membuat aktivis feminis harus bergerak dengan hati-hati (Hartati et al., 2021; Jiang & Zhou, 2022). Sementara itu, Korea Selatan memiliki masyarakat sipil yang lebih terbuka, memungkinkan organisasi feminis untuk mengadvokasi kebijakan secara langsung, mengorganisir protes, dan menggalang dukungan publik (Roces & Edwards, 2010).

Kondisi ini mendorong perbedaan strategi dimana aktivis di Tiongkok cenderung menggunakan pendekatan tidak langsung seperti aktivisme daring, seni, dan literatur (Sun & Ding, 2024), sedangkan di Korea Selatan lebih banyak digunakan demonstrasi massa, lobi, dan kampanye publik, termasuk pemanfaatan media sosial secara masif (Jimin, 2024; A. Lee & Chin, 2007). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Perbandingan Gerakan Feminisme Tiongkok dan Korea Selatan dalam Mendorong Kesetaraan Gaji Perempuan”. Perbandingan dipilih karena adanya beberapa persamaan yang signifikan antara gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan dalam mendorong kesetaraan gaji, antara lain kesamaan atas beberapa tuntutan, akar penyebab dari masalah kesenjangan gaji, serta aktor di balik gerakan di kedua negara sama-sama diprakarsai oleh golongan anak-anak muda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana karakteristik gerakan sosial feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan dalam memperjuangkan kesetaraan upah bagi perempuan?
- b. Bagaimana bentuk dan strategi gerakan tersebut mencerminkan gerakan sosial reformatif dalam konteks transnasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk membandingkan Gerakan Feminisme Tiongkok dan Korea Selatan dalam Mendorong Kesetaraan Gaji Perempuan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis sebagai pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai kajian Gerakan Feminis di Tiongkok dan Korea Selatan dalam mendorong kesetaraan gaji perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Terkait manfaat praktis, penelitian ini mampu memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi dalam upaya menyuarkan kesetaraan gaji Perempuan. Sehingga dapat dijadikan evaluasi dalam membuat kebijakan agar terbukanya kesetaraan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar teori yang relevan mengenai perbandingan gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan, serta bagaimana gerakan-gerakan ini berkontribusi dalam mendorong kesetaraan gaji perempuan. Tinjauan pustaka ini akan mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik-topik terkait seperti kesenjangan upah gender, peran gerakan feminisme, serta kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender. Penelitian yang relevan akan dianalisis untuk memahami peran penting kebijakan internasional seperti yang dilakukan oleh OECD, serta perbandingan pendekatan feminisme di berbagai negara.

Dalam konteks Korea Selatan dan Tiongkok, penelitian yang dibahas dalam bagian ini juga akan menyentuh mengenai pengaruh budaya patriarki, norma sosial, dan hambatan institusional yang menghambat perempuan dalam mencapai kesetaraan ekonomi. Dengan membandingkan berbagai pendekatan dan hasil yang ditemukan dalam literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminisme di kedua negara tersebut dalam upaya mendorong kesetaraan upah bagi

perempuan. Tinjauan pustaka ini juga akan memperkaya analisis dengan membandingkan berbagai temuan dari studi-studi yang ada, yang nantinya akan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan saran penelitian ini.

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

No	Judul	Substansi	Hasil Temuan
1	2	3	4
1	Peran OECD dalam Mempromosikan Kesetaraan Upah Berbasis Gender di Korea Selatan (Atara, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran OECD melalui kebijakan OECD dalam mengurangi kesenjangan upah berbasis gender. Pertumbuhan perekonomian Korea Selatan yang semakin pesat menjadikan perbedaan upah pekerja perempuan dengan laki-laki semakin tinggi. Sehingga OECD bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan guna mengurangi kesenjangan upah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori feminisme sosialis guna menjelaskan fenomena struktur patriarki agar kesetaraan gender dapat terwujud. Kesetaraan gender mengacu kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan mengenai kesempatan kerja. Untuk memahami indikator dan variabel tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan melalui wawancara dan studi kepustakaan.	Penelitian ini menemukan peran OECD dan pemerintahan Korea Selatan dalam mengupayakan kesetaraan upah dengan memperbaiki insentif pekerja untuk penerima upah; mendorong perubahan perilaku di antara laki-laki dan perempuan dengan memerangi jam kerja yang panjang; mempromosikan bentuk cuti berbayar yang lebih setara dan mendorong perubahan di tempat kerja; memiliki lapangan kerja yang meningkat pesat sehingga kesenjangan upah terhadap laki-laki menyempit dan memiliki perubahan baik dalam perilaku penawaran tenaga kerja perempuan maupun pada permintaan tenaga kerja, sehingga perempuan dapat mengalihkan aktivitas di rumah mereka ke pasar tenaga kerja.
2	Diplomasi Digital Midwives4all Sebagai Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia di Uganda (Manik, 2020)	Kampanye digital memungkinkan pemerintah Swedia untuk memproyeksikan nilai-nilai Swedia dan menjangkau berbagai komunitas di Uganda melalui berbagai media baik online maupun offline serta melalui para pahlawan yang dirangkul oleh pemerintah Swedia untuk membangun kesadaran akan peran penting bidan dalam meningkatkan pemenuhan kesehatan dan hak-hak seksual serta reproduksi (SRHR). Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kampanye	Kampanye Midwives4all ini telah mengangkat suara mereka yang selama ini mengalami diskriminasi dan menderita ketidakadilan dengan memusatkan perhatian pada pentingnya berinvestasi dalam bidang kebidanan sehingga tujuan kebijakan luar negeri feminis Swedia yaitu pemenuhan terhadap <i>reproductive health and rights</i> (SRHR) dapat tercapai, selain itu kampanye ini semakin

No	Judul	Substansi	Hasil Temuan
1	2	3	4
		Midwives4all mempengaruhi upaya pemenuhan hak-hak perempuan di Uganda. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis data process-tracing dan menggunakan konsep kebijakan luar negeri feminis dan feminisme liberal sebagai dasar analisis.	menjadikan Swedia sebagai advokat yang kuat dalam meningkatkan <i>maternal</i> dan <i>child health</i> di Uganda.
3	Gerakan Perempuan Dalam Mendorong Pertumbuhan Norma Kesetaraan Gender Internasional (Setiyaningsih, 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gerakan perempuan, khususnya di Eropa dan AS dalam mendorong pertumbuhan norma kesetaraan gender menjadi norma internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan <i>teori life cycle of norm</i> yang dikembangkan oleh Finnemore & Sikkink, penelitian ini mencoba menjelaskan perkembangan norma kesetaraan gender melalui tiga tahapan, yaitu <i>norm emergence</i> , <i>norm cascade</i> , dan <i>norm internalization</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterlibatan yang kuat dari gerakan perempuan di setiap tahapan, mulai dari era perang dunia, perang dingin hingga pasca perang, khususnya ketika organisasi internasional seperti Liga bangsa-bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk. Langkah demi langkah menunjukkan bagaimana gagasan norma kesetaraan gender dipromosikan oleh kaum feminis di negara-negara barat.
4	Dinamika Pertumbuhan Feminisme Di China Dalam Perspektif Konstruktivisme (Hartati et al., 2021)	Artikel ini menjelaskan bagaimana proses tumbuhnya feminisme di Tiongkok dalam perspektif konstruktivisme mengenai siklus hidup norma. Secara teori, ada tiga tahapan bagaimana suatu norma yang dalam hal ini feminisme melalui siklus hidup normal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur.	Dalam artikel ini temuannya terdapat tiga proposisi terkait munculnya norma-norma internasional dalam feminisme di Tiongkok, yang pertama adalah munculnya Norma yang digambarkan dengan munculnya salah satu tokoh perempuan terkenal yaitu He Zhen yang mengadopsi feminisme barat dengan tidak meninggalkan identitas budaya Tionghoa yang dianggap baik baginya. Kedua, Norm Cascade tergambar dari pengaruh negara Tiongkok yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadakan di Kopenhagen Denmark. Ketiga, Internalisasi digambarkan dengan proses

No	Judul	Substansi	Hasil Temuan
1	2	3	4
			tumbuhnya feminisme Tiongkok, yaitu proses peleburan dengan budaya dalam tubuh feminisme itu sendiri, atau dengan kata lain feminisme yang berkembang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain dan hanya dimiliki oleh Tiongkok.
5	Analisis Gender dalam Dunia Kerja: Studi tentang Ketidaksetaraan Gaji dan Mobilitas Karir (Anwar, 2023)	Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja, yaitu ketidaksetaraan gaji dan hambatan dalam mobilitas karir. Melalui pendekatan campuran yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi pola-pola dan faktor-faktor yang mendorong ketidaksetaraan ini.	Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja. Implikasi dari temuan ini dapat membantu merancang kebijakan dan inisiatif yang lebih efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan gaji dan memfasilitasi mobilitas karir yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek kesetaraan upah gender, termasuk peran OECD dalam mengurangi kesenjangan upah di Korea Selatan serta dampak kebijakan internasional terhadap ketidaksetaraan upah (Yolanda & Ginting Manik, 2020). Selain itu, penelitian terkait diplomasi digital Swedia di Uganda dan gerakan perempuan dalam konteks internasional menyoroti pentingnya inisiatif global dalam memperjuangkan hak-hak gender (Atara, 2021). Studi lain juga telah menganalisis dinamika feminisme di Tiongkok serta ketidaksetaraan upah dalam dunia kerja, memberikan wawasan tentang faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kesenjangan gender (Hye-Sook Hwang, 2022).

Namun, penelitian ini berkontribusi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan membandingkan gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan dalam konteks kesetaraan gaji perempuan (C. K. Lee, 2023). Analisis ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang dinamika feminisme di Asia Timur tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana perbedaan budaya (Jimin, 2024), kebijakan, dan strategi aktivisme mempengaruhi perjuangan kesetaraan upah. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi literatur yang ada dengan pendekatan komparatif yang lebih mendalam serta analisis komprehensif terhadap upaya feminisme dalam mendorong kesetaraan gaji di kedua negara (Ababneh et al., 2023).

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1. Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender tidak hanya tercermin dalam kesenjangan upah, tetapi juga dalam akses terhadap pekerjaan dan posisi kepemimpinan (Halizah & Faralita, 2023). Di banyak negara, termasuk Tiongkok dan Korea Selatan, hal ini berakar pada norma sosial yang menempatkan perempuan dalam peran domestik dan membatasi mobilitas mereka di ranah profesional (Saragi & Agustina, 2022).

Di Korea Selatan, sistem kerja berbasis hierarki sering menjadi penghambat bagi perempuan untuk mencapai posisi strategis, dan meskipun regulasi kesetaraan gender telah diterapkan, pelaksanaannya masih lemah karena kuatnya budaya kerja yang maskulin (Latura & Weeks, 2023). Sementara itu, di Tiongkok, penerapan kebijakan kesetaraan gender juga menghadapi hambatan, terutama karena pengaruh nilai-nilai Konfusianisme dan pembatasan terhadap gerakan feminisme yang memperjuangkan hak perempuan (Jiang & Zhou, 2022).

Hambatan struktural ini membuat perempuan di kedua negara menghadapi tantangan ganda: tidak hanya dalam hal kesetaraan upah, tetapi juga dalam memperoleh pengakuan profesional yang setara (Evans, 2017). Maka dari itu, diskriminasi gender di dunia kerja bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks, dibentuk oleh budaya dan kebijakan yang mendasarinya (Zhu, 2021). Dari konsep diskriminasi gender ini, kemudian muncul dorongan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Dorongan ini kemudian terkulminasi menjadi tujuan utama dari konsep dan gerakan feminisme.

1.6.2. Feminisme

Feminisme secara umum didefinisikan sebagai suatu paham yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Tong, 2013). Namun, dalam perkembangannya, feminisme memiliki berbagai aliran pemikiran yang berbeda dalam memandang akar masalah ketidaksetaraan gender dan strategi untuk mengatasinya. Dalam pendekatan feminisme, patriarki merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama, baik dalam ranah publik, seperti politik, ekonomi, dan agama, maupun dalam ranah pribadi, seperti keluarga dan relasi personal. Sistem patriarki memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan pemberian otoritas dan kesempatan terhadap laki-laki, sekaligus menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Para pemikir feminis berpendapat bahwa patriarki bukanlah sesuatu yang alami atau tak terhindarkan, melainkan merupakan konstruksi historis dan budaya yang dapat dihapuskan.

Salah satu argumen utama pendekatan feminisme adalah bahwa patriarki tidak hanya hadir dalam bentuk hukum atau institusi yang jelas, tetapi juga dalam praktik sehari-hari, norma sosial, dan ideologi yang dianggap wajar. Sebagai contoh, ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga standar kecantikan yang menuntut perempuan merupakan contoh dari ekspresi kekuasaan patriarkal. Para feminis radikal seperti Sylvia Walby (1990) mendefinisikan patriarki sebagai “sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan.” Walby juga menekankan bahwa

patriarki bekerja di dua tingkat. Pertama, tingkat struktural, yang dapat dilihat dalam sistem ekonomi dan hukum. Kedua, tingkat interpersonal, yang terlihat dalam relasi antar-individu.

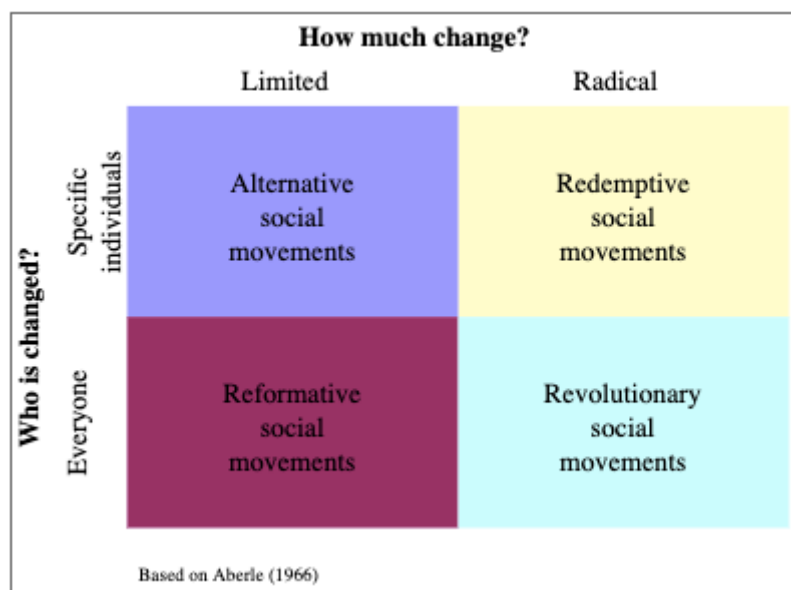
Pendekatan feminisme juga menekankan bahwa patriarki tidak bekerja secara tunggal. Dalam feminisme interseksional yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (2010), patriarki dianggap setara dengan bentuk penindasan lain seperti rasisme, klasisme, dan kolonialisme. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh perempuan mengalami tekanan dari sistem patriarki, tingkat yang mereka alami berbeda, tergantung pada identitas dan posisi sosial mereka. Misalnya, perempuan Afrika-Amerika cenderung mengalami tekanan patriarki yang lebih buruk dibandingkan dengan perempuan kulit putih atau Kaukasia, karena tekanan patriarki yang mereka alami diperburuk oleh stigma rasisme.

Penelitian ini akan menggunakan aliran Feminisme Liberal, yang berangkat dari keyakinan bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena kurangnya akses perempuan terhadap hak-hak hukum dan kesempatan yang sama di ruang publik. Fokus utama pendekatan ini adalah reformasi kebijakan dan perundang-undangan untuk menjamin kesetaraan, termasuk dalam hal gaji dan akses pekerjaan (Wibowo et al., 2022; Amin & Nazariana, 2023). Pendekatan tersebut digunakan untuk membandingkan bagaimana strategi gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan menghadapi hambatan struktural dan budaya dalam mendorong kesetaraan gaji perempuan (Lee & Chin, 2007; Sun & Ding, 2024). Guna mewujudkan tujuan-tujuan and cita-cita pendekatan feminisme, beberapa pemikir feminis berupaya untuk menciptakan aksi nyata melalui gerakan sosial.

1.6.3 Gerakan Sosial

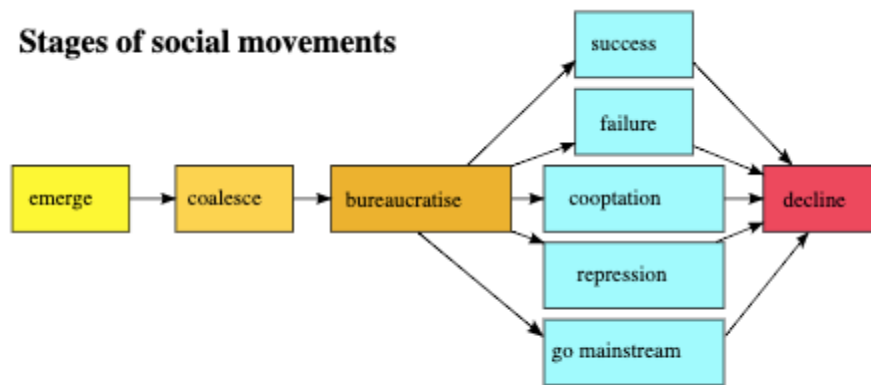
Mario Diani mendefinisikan gerakan sosial sebagai jaringan interaksi informal antara individu, kelompok, dan organisasi yang terlibat dalam aksi kolektif berdasarkan identitas atau tujuan bersama (Saud, 2016). Gerakan ini tidak hanya berupa protes sesaat, tetapi merupakan upaya terorganisasi dan berkelanjutan untuk mendorong perubahan sosial, politik, atau budaya (Della Porta & Diani, 1999). Dalam kerangka ini, gerakan sosial dibangun atas relasi yang memungkinkan distribusi informasi, mobilisasi sumber daya, serta koordinasi aksi kolektif (Salvini, 2024). Salah satu konsep inti dalam teori gerakan sosial adalah *collective action* atau aksi kolektif. *Collective action* sendiri merujuk pada tindakan yang dilakukan secara bersama oleh sekelompok individu atau komunitas untuk mencapai tujuan bersama, umumnya dalam rangka menentang ketidakadilan, menuntut perubahan sosial, atau menyuarakan hak-hak tertentu.

Gambar 1.3 Tipe *Social Movement* Menurut Aberle (1966)



Dalam teori gerakan sosial, terdapat beberapa jenis, antara lain gerakan sosial reformatif, revolusioner, reaksioner, alternatif, dan keagamaan. Dalam penelitian ini, jenis gerakan sosial yang akan digunakan adalah gerakan sosial reformatif. *Reformative social movement* atau gerakan sosial reformatif merupakan salah satu jenis gerakan sosial yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial dalam skala terbatas namun signifikan (Mills, 2014). Tidak seperti gerakan revolusioner yang berusaha menggulingkan sistem sosial atau politik secara keseluruhan, gerakan reformatif lebih berfokus pada perubahan kebijakan, peraturan, atau praktik tertentu dalam kerangka sistem yang sudah ada. Dengan kata lain, gerakan ini tidak menolak struktur dasar masyarakat, tetapi ingin memperbaiki ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi di dalamnya.

Ciri utama dari gerakan sosial reformatif adalah pendekatannya yang institusional dan advokatif. Aktivis dalam gerakan ini cenderung menggunakan jalur legal, seperti *lobbying*, kampanye publik, petisi, penyuluhan, atau kerja sama dengan lembaga pemerintah, untuk memengaruhi perubahan. Oleh karena itu, *reformative social movement* umumnya memiliki hubungan yang lebih dialogis dengan struktur kekuasaan, meskipun tetap kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau diskriminatif (Flynn, 2011).

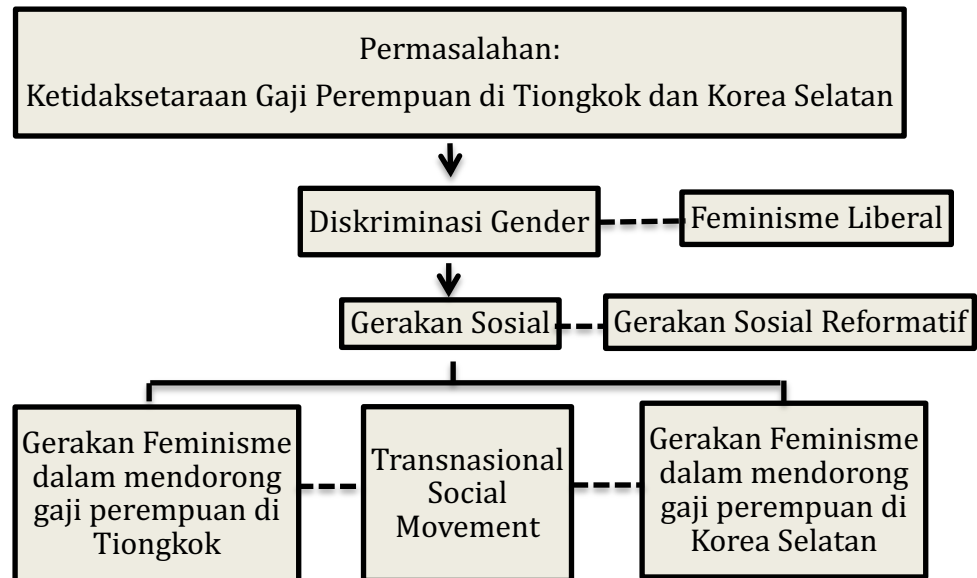
Gambar 1.4 Tahapan *Social Movement*

Adapted from Blumer (1969), Mauss (1975), and Tilly (1978)

Contoh nyata dari gerakan sosial reformatif adalah gerakan feminisme yang mendorong kesetaraan gender melalui reformasi undang-undang ketenagakerjaan, upah yang setara, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Gerakan lingkungan yang menuntut regulasi emisi karbon atau perlindungan hutan juga termasuk dalam kategori ini, karena mereka tidak menolak sistem industri sepenuhnya, tetapi ingin membentuk ulang praktiknya agar lebih adil dan berkelanjutan.

Keberhasilan gerakan sosial reformatif sangat bergantung pada konteks politik dan keterbukaan sistem demokrasi. Di negara-negara dengan kebebasan sipil yang tinggi, gerakan ini seringkali memiliki ruang untuk memengaruhi kebijakan secara efektif. Namun di negara yang otoriter, gerakan reformatif bisa mengalami pembatasan dan harus beradaptasi dengan pendekatan yang lebih simbolik atau terselubung.

1.6.5. Alur Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

a. Diskriminasi Gender

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi diskriminasi gender menurut Okin (1989), yaitu perlakuan tidak setara yang dialami individu berdasarkan gender mereka, terutama dalam cara-cara yang memperkuat dominasi laki-laki.

b. Feminisme

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi feminisme liberal menurut Wibowo et al (2022), yaitu bahwa kesetaraan gender hanya dapat tercapai jika perempuan mampu mendapatkan akses yang memadai dan setara terhadap hak-hak hukum dan kesempatan yang sama di ruang publik.

c. Gerakan Sosial Reformatif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi gerakan sosial menurut Della Porta & Diani (1999), yakni upaya kolektif dan terorganisir oleh sekelompok individu yang sering kali muncul di luar lembaga formal dan bergantung pada mobilisasi akar rumput (*grassroot*), aksi kolektif, dan kampanye berkelanjutan untuk mencapai tujuan mereka.

1.7.2. Definisi Operasional

a. Diskriminasi Gender

Penelitian ini memiliki fokus utama untuk menganalisis upaya menghentikan salah satu bentuk diskriminasi gender di Tiongkok dan Korea Selatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

- i. Bagaimana sejarah diskriminasi gender di Tiongkok dan Korea Selatan?
- ii. Bagaimana perwujudan diskriminasi gender di Tiongkok dan Korea Selatan, khususnya dalam aspek ekonomi dan kesempatan kerja?

b. Feminisme Liberal

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat studi kasus gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan untuk mendorong kesetaraan upay. Dengan demikian, perlu dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

- i. Bagaimana implementasi pendekatan feminisme liberal di Tiongkok dan Korea Selatan?
- ii. Bagaimana pendekatan feminisme liberal memandang upaya pekerja di Tiongkok dan Korea Selatan dalam memperjuangkan kesetaraan gaji?

b. Gerakan Sosial Reformatif

Penelitian ini memiliki fokus utama untuk melakukan studi perbandingan terhadap gerakan sosial di Tiongkok dan Korea Selatan, secara khusus gerakan sosial reformatif yang dilakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gaji. Dengan demikian, perlu dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

- i. Apa saja bentuk-bentuk gerakan sosial reformatif di Tiongkok dan Korea Selatan?
- ii. Bagaimana dampak dari gerakan sosial reformatif yang telah diterapkan di Tiongkok dan Korea Selatan?

1.8 Argumen Penelitian

Gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan merepresentasikan dua bentuk perjuangan yang berbeda dalam melawan ketimpangan gender, khususnya dalam hal kesetaraan gaji. Meskipun keduanya berangkat dari semangat yang sama untuk menantang struktur patriarki yang menindas perempuan, perbedaan dalam konteks politik, sosial, dan budaya telah menghasilkan dinamika gerakan yang tidak seragam. Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan dalam memperjuangkan kesetaraan gaji memiliki beberapa persamaan yang signifikan, terdapat pula beberapa perbedaan

penting yang disebabkan oleh signifikansi budaya masing-masing negara, strategi dan taktik gerakan sosial yang digunakan, serta bagaimana gerakan tersebut mampu beradaptasi dengan konteks budaya dan sistem politik setempat.

Sebagai bagian dari transnational social movement, feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan tidak hanya bergerak sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan individu, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan kolektif yang memproduksi wacana dan tekanan sosial-politik, baik secara lokal maupun lintas batas negara. Dalam kerangka teori gerakan sosial, aksi kolektif feminis tidak dapat dilepaskan dari peranannya sebagai alat untuk membangun solidaritas, memobilisasi sumber daya, dan mendefinisikan ulang relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan gender. Karena itu, penelitian ini berpandangan bahwa pemahaman atas gerakan feminisme sebagai bagian dari gerakan sosial sangat penting untuk menganalisis bagaimana strategi dan taktik yang mereka pilih berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, yang dalam penelitian ini berupa kesetaraan gaji.

Budaya lokal turut menjadi variabel penting dalam membentuk arah dan respons gerakan feminis terhadap isu ketimpangan upah. Di Tiongkok, kultur kontrol negara dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi membuat feminisme berkembang dalam bentuk yang lebih terselubung dan taktis. Sebaliknya, di Korea Selatan, meskipun juga menghadapi tantangan dari kelompok konservatif, ruang sipil yang relatif lebih terbuka memungkinkan gerakan feminis untuk melakukan intervensi yang lebih eksplisit terhadap wacana publik dan kebijakan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi bahwa

kesetaraan gaji tidak hanya merupakan isu ekonomi, tetapi juga hasil dari negosiasi budaya dan politik yang kompleks.

Dalam konteks tersebut, perbandingan gerakan feminisme di kedua negara dapat dianalisis melalui dua indikator yang dikemukakan oleh Rosemarie Tong, yakni strategi dan taktik. Di Tiongkok, strategi feminisme lebih berfokus pada pencapaian kesetaraan ekonomi dan politik melalui jalur hukum dan media daring, sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem politik yang represif. Sementara di Korea Selatan, strategi feminisme cenderung menitikberatkan pada transformasi sosial dan budaya, dengan cara membongkar stereotip gender melalui kampanye sosial dan penguatan organisasi masyarakat sipil. Dari segi taktik, feminisme Tiongkok banyak memanfaatkan aktivisme digital dan mobilisasi terbatas sebagai bentuk perlawanan simbolik, sedangkan feminisme Korea Selatan lebih menekankan pendekatan edukatif dan advokatif dalam mendorong reformasi kebijakan secara institusional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks politik dan budaya tidak hanya membentuk karakter gerakan, tetapi juga memengaruhi sejauh mana feminisme dapat secara efektif mendorong kesetaraan gaji sebagai bagian dari perjuangan keadilan gender.

1.9 Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih sering menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Kuantitatif, 2016). Penelitian ini lebih menekankan pada proses dan makna. Contohnya, ketika seseorang menangis, kebanyakan orang secara langsung akan berasumsi bahwa orang tersebut sedang sedih. Meskipun

umumnya orang menangis karena sedih, penelitian kualitatif tetap mempertanyakan alasan di balik tangisan tersebut. Mungkin seseorang menangis karena sangat bahagia, misalnya setelah menerima hadiah atau mendapatkan nilai A. Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan kualitatif menurut (Murdiyanto, 2020b) adalah penerapan pendekatan alamiah untuk mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomena, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala sosial (Murdiyanto, 2020b).

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui studi perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor apa saja yang menyebabkan adanya peristiwa tertentu (Kaharuddin, 2020). Studi ini dimulai dari mengumpulkan fakta-fakta mengenai faktor penyebab timbulnya sebuah gejala tertentu kemudian dibandingkan. Selanjutnya ditetapkan bahwa suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu gejala tertentu, itulah yang menyebabkan gejala tersebut (Syahrizal & Jailani, 2023). Studi deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kesenjangan gender di tempat kerja yang dialami perempuan di Tiongkok dan Korea Selatan, kemudian dianalisis apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana perbandingan kedua negara tersebut mengatasi fenomena tersebut yang nantinya akan dianalisis perbandingan Gerakan feminisme dari kedua negara tersebut (Sugiyono, 2010).

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi terkait dengan suatu pertanyaan ataupun fenomena yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, dari situs penelitian juga dapat memberikan bantuan dalam menentukan jawaban terhadap definisi masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Dalam penelitian yang menggunakan teknik *desk research* ini, digunakan beberapa sumber pustaka baik dari buku, jurnal sejenis dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai bagaimana Gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan yang menjelaskan bagaimana fenomena kesenjangan gender di tempat kerja di kedua negara tersebut terjadi (Somantri, 2005).

1.9.4. Jenis Data

Menurut Kuantitatif (2016) data kualitatif adalah data yang berbentuk frasa, kalimat, pernyataan, skema, gambar ataupun bagan yang berisi hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha memperoleh informasi tertulis seputar alur agenda Gerakan feminisme yang dilakukan oleh Tiongkok dan Korea Selatan.

1.9.5. Sumber Data

Menurut Alamona et al. (2017) data adalah salah satu bentuk jamak dari datum, yang menggambarkan bahwa hasil pengamatan dari karakteristik populasi maupun sampel seringkali dalam bentuk angka. Syarat dari data penelitian adalah harus objektif, *up to date* sesuai dengan kondisi saat ini dan harus dapat

menggambarkan seluruh sampel penelitian atau bersifat representative (Alamona et al., 2017). Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Masing-masing data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Data Primer

Menurut Murdiyanto (2020b) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sejalan dengan pandangannya Priyono, dalam hal ini Sugiyono juga menyampaikan hal serupa dimana menurutnya sumber primer merupakan sumber data yang diambil langsung dari pengumpul data melalui berbagai cara (Kuantitatif, 2016). Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari pernyataan-pernyataan mengenai kasus kesenjangan upah perempuan di portal-portal berita Tiongkok dan Korea Selatan.

2) Data Sekunder

Menurut Murdiyanto (2020b), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, dari dokumen berupa laporan, profil, buku pedoman maupun penelitian-penelitian terdahulu. Data sekunder inilah yang digunakan pada penelitian ini yang berupa sumber pustaka dari buku, jurnal sejenis dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai Gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Alamona et al. (2017) pengumpulan data merupakan salah satu hal utama yang mempengaruhi kualitas penelitian selain kualitas instrumen penelitian.

Jika dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data ini menggunakan sumber primer di mana sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau yang dikenal dengan *desk research*. Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk menggali beberapa hal seperti bagaimana kesenjangan upah penghasilan berdasarkan gender yang didapatkan dari berbagai laporan, penelitian sebelumnya dan portal berita Tiongkok dan Korea Selatan.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Alamona et al. (2017), analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data terkumpul. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan, yaitu cara untuk mengkaji atau menyelidiki dengan membandingkan dua atau lebih objek kajian Menurut Sjachran Basah (2004). Dalam konteks studi perbandingan, metode ini memungkinkan peneliti untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara objek-objek tersebut. Dengan membandingkan aspek-aspek tertentu dari dua atau lebih objek, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif dan terperinci (Turner, 2017). Hal ini membantu dalam menjelaskan fenomena yang sedang diteliti dengan lebih baik, memberikan gambaran yang lebih jelas dan tegas tentang karakteristik masing-masing objek, dan bagaimana mereka berinteraksi atau berbeda satu sama lain (S. Kim & Kim, 2010).

Sedangkan untuk interpretasi data, penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan

menyederhanakan dan memilah informasi relevan dari data sekunder agar lebih terarah. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif tematik untuk mempermudah peneliti melihat pola dan hubungan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan merumuskan temuan berdasarkan analisis data, yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.

1.9.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data merupakan elemen penting dalam memastikan validitas hasil penelitian. Menurut Creswell & Creswell (2017), kualitas data mencakup kelengkapan, keakuratan, konsistensi, serta ketepatan waktu dalam pengumpulan dan penyajian informasi. Uji terhadap kualitas data dilakukan untuk menjamin bahwa data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat validitas serta reliabilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal akademik, laporan resmi, publikasi lembaga internasional, serta situs terpercaya. Pemilihan dan verifikasi sumber dilakukan secara cermat untuk memastikan relevansi dan akurasi data terhadap topik penelitian. Seluruh referensi juga dicantumkan secara sistematis dalam daftar pustaka sebagai bentuk transparansi akademik. Dengan pendekatan ini, kualitas data yang digunakan diharapkan dapat mendukung analisis secara objektif dan memperkuat kesimpulan penelitian.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang akan menjelaskan secara spesifik mengenai analisis perbandingan gerakan feminisme

Tiongkok dan Korea Selatan dalam mendorong kesetaraan gaji perempuan. Keempat bab tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.10.1. BAB I

Bab pertama dalam penelitian ini menjelaskan gambaran umum mengenai topik penelitian. Dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran teoritis, argumen penelitian, tipe penelitian, serta sumber penelitian. Penyusunan bab ini menjelaskan *overview* dari masing-masing negara dalam hal kesenjangan gender yang nantinya akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya

1.10.2. BAB II

Bab ini akan membahas berbagai literatur yang relevan dengan penelitian tentang kesenjangan gender di dunia kerja dan gerakan feminisme dalam konteks Tiongkok dan Korea Selatan. Diawali dengan konsep kesenjangan gender, termasuk definisi, metode pengukuran, dan faktor-faktor penyebabnya yang meliputi aspek institusional, sosial, dan budaya. Selanjutnya, akan dibahas mengenai perbedaan gerakan feminisme antara Tiongkok dan Korea Selatan, serta studi kasus mengenai sejarah, perkembangan, upaya, dan kebijakan pemerintah kedua negara dalam mendorong kesetaraan gaji perempuan. Bab ini akan ditutup dengan analisis efektivitas gerakan feminisme dalam konteks kesetaraan gaji perempuan di kedua negara.

1.10.3. BAB III

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan hasil analisis yang dilakukan terkait perbandingan gerakan feminisme antara Tiongkok dan Korea Selatan. Bab

ini akan menjawab rumusan masalah, menjelaskan persamaan dan perbedaan gerakan feminisme di Tiongkok dan Korea Selatan terkait kesetaraan gaji, menjelaskan secara detail bagaimana penelitian ini melakukan *desk research* untuk mengidentifikasi perbedaan strategis dan taktis gerakan feminisme dan kondisi kesetaraan gaji perempuan di kedua negara, serta implementasi teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

1.10.4. BAB IV

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan hasil kesimpulan dari penelitian kualitatif ini. Dimana kesimpulan tersebut diperoleh dari pembahasan jawaban rumusan masalah yang telah dianalisis dengan data dan teori yang ditemukan penulis. Dalam bab ini juga akan dilengkapi dengan saran yang diperlukan penulis untuk menunjang kajian serupa kedepannya.